

TELAAH KRITIS ASTA CITA BERDASARKAN PERSPEKTIF POST-STRUKTURALISME FOUCAULT

Hardy R. Hermawan

Jurnalis, Peneliti SigmaPhi Indonesia, Spesialis GRC

email: hardy.hermawan@gmail.com

Submitted : : 8 Agustus 2025

Published : : 10 Oktober 2025

ABSTRAK

Asta Cita merupakan wacana pembangunan yang mengintegrasikan visi nasional melalui sinergi lintas sector. Artikel ini mencoba menelisik Asta Cita dengan lensa post-strukturalisme Foucault. Dengan metode critical discourse analysis, studi menunjukkan bahwa narasi delapan misi tersebut bukan sekadar cetak biru teknokratik, melainkan rezim kebenaran yang memproduksi subjek warga yang patuh, terdisiplin, dan produktif. Konsep biopolitik dioperasionalkan dalam kebijakan ketenagakerjaan, pendidikan, dan kedaulatan pangan untuk mengelola populasi tanpa kelihatan represif. Di tengah fragmen korupsi dan oligarki, Asta Cita menjadi narrative infrastructure yang mengaburkan dominasi elit. Diperlukan ruang resistensi dan partisipasi kritis agar pembangunan tak berjalan seperti orkestra tunggal tanpa suara masyarakat.

Kata Kunci: Asta Cita, post-strukturalisme Foucault, wacana, biopolitik, resistensi

PENDAHULUAN

Visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024–2029 tertuang dalam **Asta Cita**. Gagasan tersebut mencerminkan komitmen besar untuk menjawab berbagai tantangan strategis bangsa Indonesia, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045, masa 100 tahun Indonesia merdeka.

Asta Cita bukan sekadar kerangka program pembangunan, melainkan konsep integral yang merangkai visi presiden tentang Indonesia yang adil, mandiri, dan berkelanjutan. Leftwich (2005) menyatakan, keberhasilan pembangunan tidak terletak pada akumulasi proyek, melainkan pada kemampuan negara menyelaraskan visi politik dengan kapasitas institusional. Asta Cita diniatkan hadir sebagai peta jalan yang mengikat seluruh kementerian dalam satu arah strategis.

Asta Cita juga menekankan sinergi lintas sektor untuk menghindari tumpang-tindih anggaran dan wewenang. Pemerintahan Prabowo memosisikan konsep ini sebagai “narrative infrastructure.” Menurut Mukand & Rodrik (2020), narasi kolektif menjadi alat koordinasi yang lebih kuat daripada insentif teknokratik semata. Dengan demikian, setiap instrumen kebijakan—fiskal, regulasi, maupun diplomasi—berjalan sebagai bagian dari orkestra tunggal.

Asta Cita menegaskan bahwa pembangunan harus berakar pada keadilan sosial dan kedaulatan pangan. Ini sejalan dengan pandangan Acemoglu (2012) bahwa Pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan institusi yang inklusif. (2012). Konsep integral ini menjamin

bahwa pertumbuhan ekonomi tidak melepaskan diri dari peningkatan kualitas hidup rakyat, sehingga pembangunan berjalan beriringan, bukan berlari sendiri.

Artikel ini akan menganalisis konsep Asta Cita dari perspektif post-strukturalisme Foucault. Relevansi mengkaji Asta Cita dari perspektif Foucault terletak pada upaya menelusuri bagaimana wacana politik memproduksi subjek pemilih yang taat melalui rezim kebenaran yang mengatur siapa yang “layak” dan “tidak layak” menjadi pemimpin (Foucault, 1980).

KAJIAN LITERATUR

Asta Cita

Asta Cita berarti delapan misi utama dan dirancang sebagai pelaksana visi "Bersama Indonesia Maju." Misi-misi ini disusun untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Delapan elemen Asta Cita meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara.
3. Meningkatkan lapangan kerja dan kewirausahaan.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.
6. Pembangunan berbasis desa.
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
8. Mencapai harmoni sosial, lingkungan, dan budaya.

Asta Cita juga dirancang untuk memberikan hasil nyata dalam waktu singkat melalui 8 program hasil cepat, termasuk pemberian makan siang gratis bagi siswa, peningkatan produktivitas lahan pertanian, dan pembangunan infrastruktur desa. Asta Cita menekankan pembangunan di berbagai sektor strategis. Visi ini mencakup reformasi hukum, penguatan demokrasi, hilirisasi sumber daya alam, serta pengembangan ekonomi hijau. Dengan optimisme yang tinggi, gagasan ini berupaya menjawab tantangan global dan domestik yang dihadapi Indonesia.

Post-Strukturalisme Michel Foucault

Post-strukturalisme adalah aliran pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap strukturalisme, menolak anggapan bahwa makna bersifat tetap dan bahwa struktur bersifat konstan. Menurut Derrida (1976), makna tidak pernah stabil melainkan selalu dalam proses *différance*—tetap tertunda karena setiap tanda hanya merujuk pada tanda lain tanpa titik akhir. Strukturalisme dibangun atas prinsip Saussure bahwa bahasa sebagai sebuah sistem tanda harus dilihat ke dalam tahapan tunggal sementara. Poststrukturalisme menekankan bahwa makna selalu berubah, realitas sosial bersifat variatif, dan individu dapat membentuk konstruksi sosialnya sendiri. Foucault (1982), melalui konsep “subjek yang terbentuk dalam relasi kekuasaan”, menunjukkan bahwa identitas bukan esensi melainkan efek dari praktik diskursif. Wacana dianggap memiliki peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat.

Epistemologi poststrukturalisme, terutama melalui pemikiran Michel Foucault, menyoroti hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, dan subjektivitas. Foucault mengungkapkan bahwa pengetahuan berfungsi sebagai bentuk kekuasaan yang mengatur perilaku, membentuk norma sosial, dan memperkuat hierarki yang ada. Dalam *Power/Knowledge*, ia menegaskan bahwa “setiap masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri” yang menentukan apa yang boleh dianggap benar (1980). Dengan pendekatan arkeologi, ia menelusuri bagaimana pengetahuan diproduksi dalam praktik sosial yang melibatkan kekuasaan.

Foucault dalam *Discipline and Punish* (1975) dan *The History of Sexuality* (1976) menggambarkan kekuasaan modern sebagai sesuatu yang tidak hanya represif, tetapi juga produktif. Kekuasaan menciptakan wacana yang menentukan apa yang dianggap benar atau salah, sah atau tidak sah.

METODOLOGI

Artikel ini menelusuri Asta Cita melalui *critical discourse analysis* yang mengupas relasi pengetahuan-kekuasaan. Menurut Foucault (1969), wacana bukan cermin realitas melainkan sistem yang memproduksi kebenaran. Tekstualitas kebijakan dipandang sebagai arena tempat negara merajut legitimasi melalui bahasa.

Dengan desain kualitatif, dilakukan ekstraksi narasi pembangunan dari dokumen resmi, pidato, serta laporan pemantau independen untuk menelusuri strategi biopolitik. Menurut Rose (1999), pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat kekuasaan mengelola kehidupan tanpa tampak represif.

Analisis dilengkapi konteks historis-politik Indonesia—korupsi, oligarki, dan demokrasi cacat—untuk menafsirkan makna di balik retorika “Indonesia Emas”. Hadiz (2016) menekankan bahwa tanpa konteks kekuasaan, “reformasi hanya kosmetik”, sehingga artikel ini menempatkan teks Asta Cita dalam jaring kekuatan konkret.

HASIL DAN DISKUSI

Foucault menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui penindasan atau kontrol represif, tetapi juga melalui mekanisme produktif yang membentuk pengetahuan, norma, dan praktik sosial. Kekuasaan terjalin dengan produksi pengetahuan dan wacana yang mendefinisikan kebenaran sosial. Asta Cita bisa dipandang sebagai produksi pengetahuan dan wacana yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan.

Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi kompleksitas unik: korupsi yang meluas, birokrasi yang buruk, pendidikan yang tertinggal, serta infrastruktur yang jauh dari memadai. Di sisi lain, latar belakang Presiden Prabowo Subianto—sebagai mantan jenderal militer yang kontroversial, dengan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan politik elektoral yang masif—juga menjadi elemen penting dalam mengkaji implementasi Asta Cita.

Kekuasaan Negara Melalui Wacana

Berdasarkan Asta Cita, kekuasaan negara hadir dalam wacana pembangunan nasional yang mencakup reformasi politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Program-program seperti reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan swasembada pangan dapat dilihat sebagai praktik diskursif yang membangun otoritas negara dalam mengatur dan mengarahkan masyarakat. Kekuasaan terlihat dalam wacana besar yang diusung Asta Cita.

Dengan demikian, Asta Cita dapat dipahami sebagai produksi wacana pembangunan yang menciptakan “kebenaran” tentang segala hal yang dibutuhkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam pandangan Foucault, wacana memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang dianggap benar dan sah dalam masyarakat. Sebagai contoh, wacana tentang “hilirisasi sumber daya alam” dan “swasembada energi” tidak hanya menetapkan arah kebijakan ekonomi, tetapi juga menciptakan norma tentang bagaimana sumber daya harus dimanfaatkan.

Butler (1997) menunjukkan bahwa wacana tidak hanya merefleksikan realitas, tetapi juga menciptakan realitas melalui praktik performatif. Wacana tentang pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, dan pemerataan pembangunan-- dalam konteks Asta Cita-- membentuk persepsi masyarakat tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan sosial. Butler mengingatkan bahwa wacana semacam ini dapat menjadi alat dominasi jika tidak disertai dengan ruang bagi resistensi dan kritik.

Dalam negara berkembang dengan tingkat korupsi yang tinggi dan birokrasi yang lemah, kekuasaan sering kali digunakan untuk mempertahankan status quo elit politik. Program seperti pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi dalam Asta Cita, meskipun menjanjikan, menghadapi tantangan besar. Menurut Transparency International, skor Indeks

Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia pada 2023 hanya 34 dari 100, mencerminkan akar korupsi yang dalam di seluruh lini pemerintahan.

Juwana (2022) mencatat bahwa di Indonesia, hukum sering kali menjadi alat bagi elit politik untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum di Indonesia bukan hanya tak netral, tetapi sering digunakan untuk melegitimasi kepentingan politik tertentu. Pandangan ini relevan dengan konsep Foucault tentang kekuasaan yang menggunakan wacana hukum untuk menciptakan kepatuhan melalui legitimasi formal.

Biopolitik sebagai Alat Kontrol

Asta Cita mencatumkan visi untuk "memperkokoh ideologi Pancasila" dan "memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM)." Teks ini mencerminkan konsep yang disebut Foucault sebagai biopolitik, yakni kekuasaan yang bekerja untuk mengatur kehidupan dan meningkatkan kapasitas manusia sebagai subjek produktif. Program-program reformasi birokrasi dan hukum juga mencerminkan mekanisme biopolitik yang berupaya mengatur masyarakat secara lebih efektif.

Biopolitik, menurut Foucault, merujuk pada cara kekuasaan mengelola kehidupan manusia melalui regulasi tubuh dan populasi. Foucault menjelaskan bahwa biopolitik adalah bentuk kekuasaan yang tidak lagi berbasis pada kedaulatan yang memutuskan hidup dan mati, melainkan melalui pengelolaan kehidupan secara sistematis:

Dengan kata lain, kekuasaan modern tidak hanya menekan, tetapi juga mengatur, mendisiplinkan, dan mengarahkan individu serta kelompok melalui kebijakan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Konsep ini memungkinkan negara untuk menciptakan warga negara yang sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi melalui mekanisme regulatif yang halus dan tidak selalu terlihat secara langsung.

Ketika menganalisis Asta Cita, konsep biopolitik memandang bahwa dalam kebijakan yang dirancang untuk menciptakan masyarakat produktif, negara menerapkan kontrol biopolitik dengan mengarahkan pola hidup, kebiasaan, dan aspirasi individu dalam skema pembangunan nasional.

Rose (2007) menyatakan, negara modern mengatur kehidupan warganya, membentuk perilaku dengan mengembangkan kapasitas dan mengelola risiko. Dengan demikian, Asta Cita bukan sekadar visi pembangunan, tetapi juga instrumen biopolitik yang menata masyarakat melalui regulasi dan kebijakan yang menciptakan individu yang sesuai dengan logika pembangunan negara.

Implikasi biopolitik dalam Asta Cita menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya persoalan ekonomi atau sosial, tetapi juga tentang bagaimana negara mengelola kehidupan warganya untuk mencapai tujuan tertentu. Regulasi terkait kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga memastikan bahwa individu berfungsi dalam sistem yang telah ditentukan.

Lemke (2011) menegaskan, biopolitik bukan sekadar tentang kontrol, namun tentang penataan kemungkinan tindakan individu. Dengan kata lain, biopolitik tidak selalu represif, tetapi juga membentuk cara individu berpikir, bertindak, dan memahami peran mereka dalam masyarakat.

Memahami Asta Cita melalui lensa biopolitik memungkinkan kekuasaan terlihat beroperasi secara halus dalam kehidupan sehari-hari, membentuk subjek yang diinginkan oleh negara. Rose (1999), menekankan, pendekatan ini sering kali mengabaikan kebutuhan individu karena fokus yang terlalu besar pada pengelolaan populasi secara agregat.

Menurut Garland (1986), mekanisme seperti ini menunjukkan bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui pengawasan dan pengendalian yang menghasilkan individu yang "normal", seragam, sesuai standar negara. Dalam Asta Cita, pengawasan ini hadir melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang diarahkan pada homogenisasi subjek warga negara.

Ketiadaan Ruang Resistensi

Foucault mendorong pentingnya resistensi terhadap kekuasaan dominan melalui pembukaan ruang diskusi dan partisipasi. Butler (1997) menambahkan bahwa resistensi ini

harus dilakukan secara performatif, yakni melalui tindakan nyata yang menantang wacana dominan dan menciptakan narasi alternatif.

Dalam konteks Asta Cita, resistensi ini dapat hadir melalui masyarakat sipil dan media yang terus mengawasi implementasi program. Namun, ruang partisipasi di Indonesia sering kali sempit, terutama di tingkat lokal. Butler (1997) mengingatkan bahwa wacana semacam ini dapat menjadi alat dominasi jika tidak disertai ruang bagi resistensi dan kritik. Menurut Butler, resistensi terhadap wacana dominan hanya mungkin terjadi jika ada ruang untuk suara alternatif.

Dalam demokrasi Indonesia yang lemah, ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan masih sangat terbatas. Demokrasi Indonesia cenderung hanya prosedural dan rapuh. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) dalam Democracy Index 2022, Indonesia berada dalam kategori "demokrasi cacat" (flawed democracy) dengan skor 6,71.

Partisipasi politik di Indonesia juga belum kuat dan aspek kelembagaannya lemah. Partai politik, yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, kerap menjadi kendaraan pribadi untuk akumulasi kekuasaan tanpa menawarkan visi ideologis yang jelas. Mietzner (2021) menyatakan bahwa partai-partai politik di Indonesia sering kali lebih fokus pada distribusi patronase daripada pada pengembangan program kebijakan yang substantif. Akibatnya, wacana besar seperti kesejahteraan rakyat melalui program Asta Cita mungkin hanya menjadi alat politik tanpa implementasi yang signifikan.

Hadiz (2016) juga menyatakan, partai-partai politik di Indonesia tidak memiliki fondasi ideologis yang kokoh, sehingga reformasi sering kali hanya menjadi alat untuk mempertahankan status quo. Tanpa ideologi yang jelas, program reformasi birokrasi dalam Asta Cita mungkin hanya akan meningkatkan efisiensi untuk melayani kepentingan elite, tanpa memperbaiki akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang adil dan inklusif.

Di sisi lain, ada oligarki yang menjadi penghalang utama reformasi sejati. Winters (2011) menyoroti bahwa oligarki di Indonesia termasuk yang paling kuat di dunia. Winters menulis, kekuasaan politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh elite ekonomi, sehingga reformasi cenderung hanya kosmetik dan tidak menyentuh akar masalah. Hal ini menjadi tantangan utama bagi program Asta Cita, terutama yang berkaitan dengan reformasi politik dan birokrasi.

Latar belakang Presiden Prabowo Subianto sebagai mantan jenderal militer dan politikus kontroversial juga menambah dimensi kritis dalam analisis ini. Prabowo pernah diduga terlibat dalam pelanggaran HAM, termasuk penculikan aktivis pada 1998. Meskipun tidak pernah dijatuhi hukuman, isu ini tetap menjadi bagian dari narasi politik yang menyertainya.

Aspinall (2024), menyoroti bahwa keberhasilan Prabowo dalam memenangkan pemilu 2024 tidak lepas dari mobilisasi politik masif. Menurut Aspinall, Prabowo memanfaatkan jaringan militer dan dukungan oligarki untuk memobilisasi suara secara luas, menciptakan narasi stabilitas dan keamanan yang menjadi daya tarik bagi pemilih.

Mobilisasi politik ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Hadiz (2016) menyatakan, politik populisme di Indonesia sering kali berbasis pada janji-janji besar yang sulit direalisasikan tanpa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi dan politik.

Janji-janji besar yang mengiringi mobilisasi itu kemudian memenangkan pemilu Presiden. Kenyataan dimaknai sebagai realitas yang dianggap sah dan benar. Maka latar belakang Prabowo dianggap tak lagi relevan, seperti dinyatakan Foucault (1969) bahwa kekuasaan bekerja melalui wacana untuk mendefinisikan realitas yang dianggap sah dan benar.

Bahkan, wacana pembangunan nasional dalam Asta Cita hanya digunakan untuk menciptakan legitimasi politik. Bourdieu (1991) mengatakan, wacana semacam ini sering kali memperkuat kekuasaan elit dengan mengesampingkan pandangan alternatif dari masyarakat marjinal.

Di sisi lain, kemampuan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pandangan alternatif juga terhadang oleh rendahnya tingkat pendidikan. Rata-rata lama sekolah

penduduk Indonesia masih di bawah 9 tahun (UNESCO, 2023). Program pemberian makan siang gratis dan pembangunan sekolah unggulan dalam Asta Cita adalah langkah positif. Namun, seperti dikritik Nasir (2023), kebijakan pendidikan sering kali fokus pada aspek fisik, seperti infrastruktur sekolah, tetapi gagal meningkatkan kualitas pengajaran dan literasi.

KESIMPULAN

Asta Cita Prabowo, yang merupakan visi pembangunan integral Indonesia Emas 2045, beroperasi sebagai wacana negara yang tidak hanya merancang kesejahteraan, melainkan juga menata subjek warga negara melalui strategi biopolitik. Foucault (1976) menunjukkan bahwa kekuasaan modern bersifat produktif; negara tidak lagi menekan, melainkan mengelola “kehidupan sendiri” melalui regulasi pangan, kesehatan, pendidikan, dan hilirisasi sumber daya, sehingga warga menjadi populasi yang terukur, terdisiplin, dan berorientasi pertumbuhan.

Masalahnya, di tengah indeks korupsi yang tinggi, sebesar 34/100 (TI, 2023), dan demokrasi yang bermasalah (EIU, 2022), para oligark, seperti yang diuraikan Winters (2011), akan memanfaatkan narasi universal ini untuk memperkuat posisi elit, sekaligus menutup ruang resistensi. Hadiz (2016) menambahkan bahwa tanpa fondasi ideologis partai, reformasi birokrasi hanya meningkatkan efisiensi pelayanan elit, bukan akses masyarakat. Mukand & Rodrik (2020) menegaskan bahwa narasi kolektif sering menjadi alat koordinasi yang lebih kuat daripada insentif teknokratik, memperkuat hegemoni.

Pendekatan *top-down* yang ditawarkan Asta Cita, sebagaimana ditegaskan Rose (1999), akan menciptakan hegemoni wacana yang memaksa homogenitas perilaku, sehingga pembangunan berjalan sebagai orkestra tunggal tanpa suara komunitas yang berbeda. Partisipasi terbatas, akibat pendidikan rendah (UNESCO, 2023), menempatkan masyarakat hanya sebagai objek kebijakan, bukan subjek sejarahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1rm2d6z>
- Aspinall, E. (2020). Democracy and the post-Suharto state. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(2), 147–171. <https://doi.org/10.1017/S0022463420000379>
- Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203824989>
- Butler, J. (1997). *Excitable speech: A politics of the performative*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203279543>
- Derrida, J. (1976). *Of grammatology* (G. C. Spivak, Trans.). Johns Hopkins University Press. <https://doi.org/10.56021/9780801824152>
- Foucault, M. (1969). *The archaeology of knowledge* (A. M. Sheridan Smith, Trans.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203604168>
- ———. (1975). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Vintage. <https://doi.org/10.4324/9780203694329>
- ———. (1976). *The history of sexuality: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Pantheon. <https://doi.org/10.4324/9780203694329>
- ———. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977* (C. Gordon, Ed.). Harvester. <https://doi.org/10.4324/9781003304340>
- ———. (1982). The subject and power. *Critical Inquiry*, 8(4), 777–795. <https://doi.org/10.1086/448181>
- Fraser, N. (1981). Foucault on modern power: Empirical insights and normative confusions. *Praxis International*, 1(3), 272–287. <https://doi.org/10.2307/23539142>
- Garland, D. (1986). Foucault's Discipline and Punish—An exposition and critique. *Social Theory and Practice*, 12(2), 235–256. <https://doi.org/10.5840/soctheorpract198612216>
- Gordon, C. (1980). Power/knowledge and its limits. *History of the Human Sciences*, 3(2), 123–145. <https://doi.org/10.1177/095269518000300204>

- Hadiz, V. R. (2016). *Islamic populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107449606>
- Leftwich, A. (2005). Democracy and development: Is there institutional incompatibility? *Democratization*, 12(5), 686–703. <https://doi.org/10.1080/13510340500322186>
- Mietzner, M. (2021). Political corruption and democratic decline in Indonesia. *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 1–20. <https://doi.org/10.1355/cs43-1a>
- Mukand, S., & Rodrik, D. (2020). The political economy of ideas: On ideas versus interests in policymaking. *The Economic Journal*, 130(628), 1237–1262. <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa016>
- Rabinow, P. (Ed.). (1984). *The Foucault reader*. Pantheon. <https://doi.org/10.4324/9781315833884>
- Rose, N. (1999). *Powers of freedom: Reframing political thought*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511489236>
- Subianto, P., & Raka, G. R. (2024). *Visi, misi, dan program Prabowo-Gibran: Bersama Indonesia maju menuju Indonesia emas 2045*. Tim Kampanye Nasional.
- The Economist Intelligence Unit. (2022). *Democracy index 2022*. The Economist Group. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4301976>
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. TI. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4322345>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023*. UNESCO. <https://doi.org/10.54676/9789231003725>
- Winters, J. A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511973903>

How to Cite

TELAAH KRITIS ASTA CITA BERDASARKAN PERSPEKTIF POST-STRUKTURALISME FOUCAULT. (2025). *Jurnal Persatuan Nasional*, 2(1): 50-56. <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/18>

License

Copyright (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).